

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan hasil penelitian pustaka dengan judul “Implementasi Politik Kebangsaan NU Terhadap Kebijakan Negara Dalam Perspektif *Fiqh Siyāsah*”. Penelitian ini ditujukan untuk menjawab rumusan masalah, yaitu : Bagaimana implementasi politik kebangsaan NU terhadap kebijakan Negara? Bagaimana implementasi politik kebangsaan NU terhadap kebijakan Negara dalam perspektif *fiqh siyāsah*?

Analisis yang digunakan adalah Analisis komparasi , yaitu dengan melakukan analisis kejadian-kejadian masa lalu untuk mengetahui kenapa dan bagaimana suatu peristiwa itu telah terjadi. Hasil yang ditemukan bermanfaat untuk menentukan apakah rentetan kejadian tersebut sangat penting untuk menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan, penulisan penelitian ini menggunakan alat analisis historis karena alat uji tersebut dianggap tepat dengan mengidentifikasi teori dalam menjawab rumusan masalah.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Nahdlatul Ulama merupakan organisasi keagamaan yang berbasis nilai-nilai keislaman yang tertuang dalam paham ajaran Ahlussunnah wal jama’ah yang berdialektik dengan nilai-nilai kearifan lokal bangsa Indonesia. Dengan paham tersebut, NU mempunyai nuansa tersendiri yang tampak akomodatif terhadap nilai-nilai kearifan lokal. Yang pada akhirnya membentuk kepribadian khas Nahdlatul Ulama dan mempunyai pengaruh tersendiri terhadap perjalanan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Inilah yang kemudian menandai NU pada setiap perilaku politiknya selalu mengedepankan nilai-nilai lokal yang sudah menjadi ijtihad para pendahulu terkait dengan arah kiprah bangsa Indonesia pada tingkat politik makro maupun mikro. Seperti yang kita pahami, bahwa ijtihad politik NU selalu mengacu pada beberapa prinsip dasar dalam menjalankan organisasi, antara lain: tawassuth (moderat), tawāzun, tasāmuh, dan amar ma’ruf nahi munkar. Dengan berpijak pada tradisi fiqh, maka wilayah Hindia-Belanda ini kemudian ditetapkan sebagai dar al-salam atau dar al-shulh (negeri damai). Argumentasinya jelas: meskipun pemerintahannya tidak Islami, tetapi umat Islam di dalamnya memiliki hak untuk melaksanakan syari’at Islam dengan nyaman dan aman. Hal ini menegaskan satu prinsip, bahwa ketika prinsip dasar Islam, yakni pelaksanaan syari’at bisa dilaksanakan di sebuah negara yang struktur konstitusionalnya tidak Islami; hukum bagi negara tersebut bukanlah dar al-harb, melainkan dar al-salam, negeri damai.

Sejalan dengan kesimpulan tersebut hendaknya Nahdlatul Ulama adalah salah satu organisasi keagamaan di Indonesia yang menjadi wadah bagi nahdliyin untuk berkiprah membangun bangsa. Diharapkan, NU tidak larut dalam pertarungan yang berorientasi pada “politik kekuasaan”. Namun, sebaiknya gerakan politik NU mengarah pada “politik nilai”. Dalam menghadapi realitas kebangsaan kita yang telah mulai rapuh, dengan politik kebangsaan yang ditawarkan NU. Hal itu akan menjadi penegasan atas berakhirnya perdebatan sekitar NKRI dan Ideologi Pancasila dan secara tidak langsung menjadi pengakuan secara jantan bahwa kita telah mengalami “dis-orientasi kebangsaan” yang mengakibatkan bangsa Indonesia “sulit bersatu”.